

PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN



Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2018



PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN

Penyusun:

Ismeth Inounu
Dwi Priyanto
Ratna Ayu Saptati
Atien Priyanti
Priyono

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2018**

PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA) BERBASIS PERTANIAN

Hak Cipta @2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pernakan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pernakan
Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59, Bogor, 16151

Telp. : (0251) 8322185
Fax : (0251) 8328382; 8380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis
Pertanian / Ismeth Inounu, D. Priyanto, R.A. Saptati, A. Priyanti,
dan Priyono. – Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pernakan, 2018: v + 46 hlm; illus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN: 978-602-6473-12-7

1. Kemiskinan 2. Berbasis Pertanian 3. Sejahtera 4. BEKERJA
I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pernakan;
III. Ismeth Inounu

338.43.01

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pernakan

Tata letak dan : Priyono
rancangan sampul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Robbi, atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku yang berisikan kajian Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera dapat disusun dengan baik. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan menysasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Target program ini adalah terwujudnya masyarakat sejahtera melalui peningkatan produksi pertanian, salah satunya adalah pengembangan ayam lokal unggul.

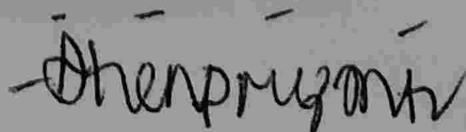
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) berinisiasi mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan "Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis Pertanian". Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber terkait dan hasil diskusi diharapkan dapat memberikan opsi kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat utamanya pada RTM berbasiskan pertanian.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan informasi/data yang tersedia. Untuk itu sangat diharapkan masukan dan saran dari para pembaca dan pemangku kebijakan guna melengkapi alternatif rekomendasi yang dihasilkan.

Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak atas partisipasinya serta Tim Kajian yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya serta dalam menyusun hasil kajiannya dalam bentuk buku yang diterbitkan ini.

Diharapkan buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengentasan kemiskinan berbasis pertanian.

Bogor, Desember 2018
Kepala Pusat,



Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Tahapan Kegiatan	3
Sasaran dan Tujuan.....	5
Kondisi Eksisting Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.....	7
Program dan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja).....	11
Ketersediaan Unggas Lokal Nasional Mendukung Program Bekerja dan Strategi Pendampingan.....	17
Rekomendasi Kebijakan Pendukung Program Bekerja berbasis Pertanian guna Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa.....	23
Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan	29
Matriks Rencana Tindak Strategi dan Kebijakan Program dan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja).....	31
Daftar Bacaan	33
Lampiran	37
Lampiran 1. Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner.....	38
Lampiran 2. Ringkasan Paparan Narasumber dalam FGD	40

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis sektor pertanian pada tahun 2018. Program ini merupakan upaya untuk memberdayakan kapasitas masyarakat miskin di desa melalui usaha berbasis pertanian secara intensif dan terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan bedah kemiskinan berbasis pertanian ini dilaksanakan melalui: (i) bantuan unggas lokal; (ii) bantuan benih dan bibit serta penguatan produksi ternak; (iii) pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi tanaman; dan (iv) pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kecukupan pangan dan gizi rumah tangga.

Dalam program ini, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan dan pengembangan 10 juta ekor bibit unggas lokal di 21 Kabupaten 10 Provinsi. Pemilihan lokasi desa dimaksud ditetapkan berdasarkan kriteria: (i) jumlah gizi buruk (stunting) tinggi; (ii) tingkat pengangguran tinggi; (iii) merupakan kantong kemiskinan; dan (iv) daerahnya tergolong kategori tertinggal atau berkembang.

Agar Program BEKERJA ini dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan mulai dari sebelum dilaksanakan kegiatan (ex-ante), tahap pelaksanaan kegiatan (on-going), dan setelah dilaksanakannya kegiatan (ex-post). Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Program BEKERJA dapat berjalan dengan baik.

Berkenaan dengan itu, tim pelaksana pusat dan tim teknis kabupaten/kota perlu mensinergiskan program dan kegiatan untuk mendukung program BEKERJA. Demikian sehingga pelaksanaan kegiatan BEKERJA mulai dari penetapan penerima bantuan,

pengadaan, penyaluran, pemantauan dan pembinaan dapat terlaksana dengan baik dan mampu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat di Desa. Sektor pertanian seyogyanya menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk membangun efektifitas pelaksanaan program BEKERJA, turut diperhatikan agro-klimat dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah. Target program ini adalah terwujudnya masyarakat sejahtera melalui peningkatan produksi pertanian, salah satunya adalah pengembangan ayam lokal unggul.

TAHAPAN KEGIATAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) berinisiasi mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bertemakan “Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) berbasis Pertanian”. Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber terkait dan hasil diskusi diharapkan dapat memberikan opsi kebijakan terhadap peningkatan Kesejahteraan Rakyat utamanya pada RTM berbasiskan pertanian. Acara FGD ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat Calliandra (Aula) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Jl. Raya Pajajaran Kav E59 Bogor 16128.

Narasumber terdiri dari 3 (tiga) orang terkait dengan topik kajian yang relevan, yaitu:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dengan topik “Program dan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)”
2. Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI) dengan topik “Ketersediaan Unggas Lokal Nasional mendukung Program BEKERJA dan Strategi Pendampingan”
3. Prof (R). Dr. Ir. Pantjar Simatupang, MS, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan topik “Rekomendasi Kebijakan Pendukung Program BEKERJA berbasis Pertanian guna Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Desa”

Bertindak sebagai pembahas dalam diskusi ini:

1. Prof (R). Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
2. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec – Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.

3. Prof (R). Dr. Ir. Sofjan Iskandar, MRur.Sc.- Balai Penelitian Ternak Bogor.

Acara dibuka oleh Kepala Puslitbang Peternakan dan dihadiri sejumlah 40 orang berasal dari instansi terkait. Hal ini meliputi pelaku usaha unggas lokal dan asosiasi/gabungan pelaku usaha unggas, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, BPPSDMP, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Himpuli, FMPI, PT Sumber Unggas, PT Putra Perkasa Genetika, Pejabat Struktural Lingkup Puslitbang Peternakan, dan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) Puslitbang Peternakan.

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari diskusi ini adalah rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan program BEKERJA dapat dilaksanakan dengan optimal. RTM sebagai penerima manfaat Program BEKERJA diharapkan dapat memiliki usaha berbasis pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

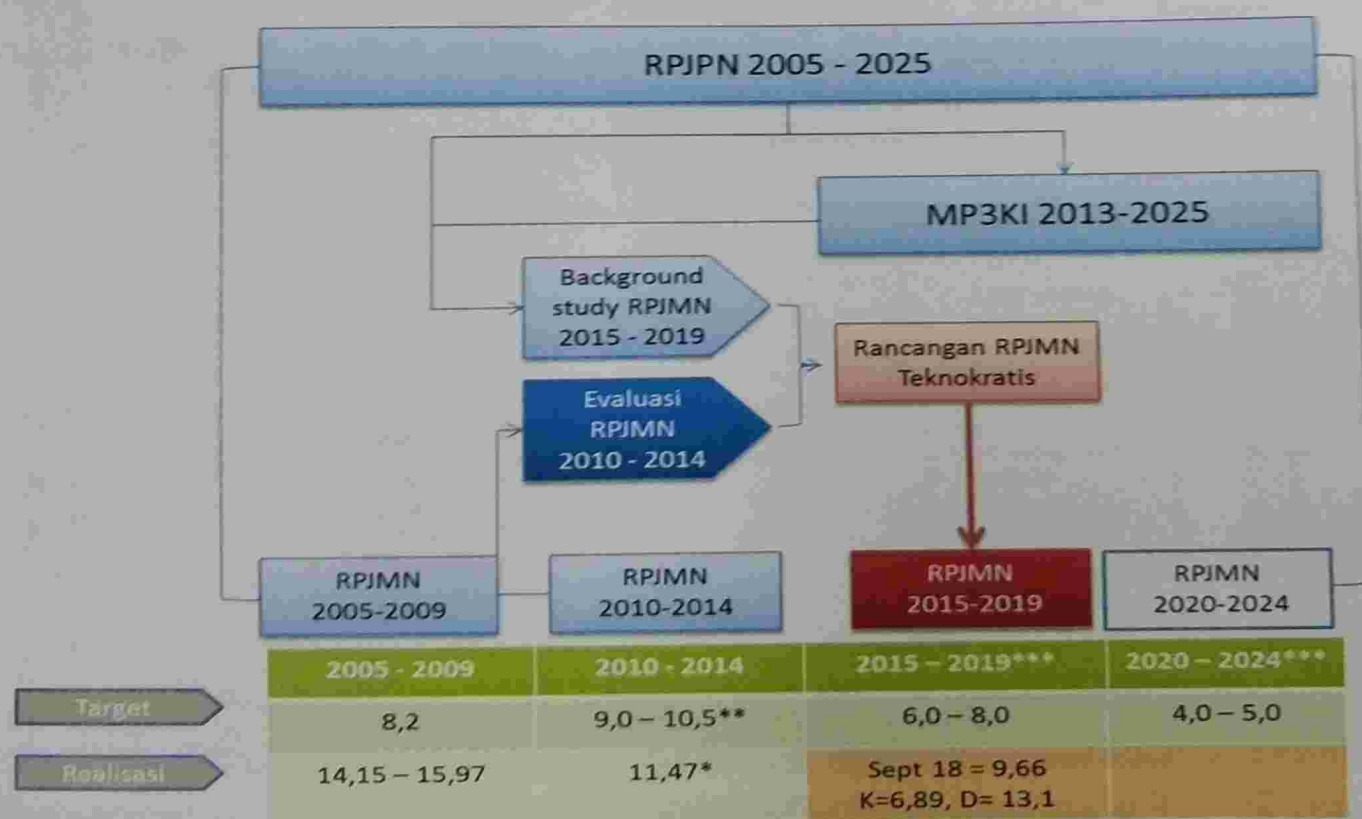
TUJUAN

FGD ini bertujuan untuk menghimpun saran, masukan, informasi dan data pendukung yang relevan untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan program BEKERJA dapat dilaksanakan dengan optimal.

KONDISI EKSISTING PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan atas pangan bergizi yang memadai ditambah dengan kebutuhan non makanan minimum (Wolff *et al.*, 2015). Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks (multidimensional) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan penanggulangannya tidak hanya menyangkut faktor ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor sosial, budaya dan politik. Di Indonesia, seseorang dikategorikan miskin apabila mempunyai pendapatan dibawah Rp. 370.000/kapita/bulan.

Pemerintah, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 menargetkan penurunan angka kemiskinan pada kisaran 6-8%. Target ini semakin menurun dibandingkan dengan RPJMN sebelumnya (periode 2010-2014) yaitu pada kisaran 9-10,5% (Gambar 1).



Gambar 1. Sasaran Pengurangan Kemiskinan RPJMN 2015 – 2019

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang nyata yaitu berupa penurunan persentase penduduk miskin. Hingga bulan September 2018, angka kemiskinan Indonesia berkisar 9,66% (25,67 juta orang), menurun dari 10,12% (26,58 juta orang) pada September 2017 (BPS, 2018). Salah satu penyebab penurunan dikarenakan terkendalanya inflasi selama Maret-September 2018 yang hanya sebesar 0,94%. Selain itu faktor yang tidak kalah penting adalah adanya peningkatan upah riil buruh tani (dari Rp. 37.602 menjadi Rp. 38.205), peningkatan nilai tukar petani selama periode yang sama (naik 1,21%) dan stabilisasi harga pangan dan komoditas utama

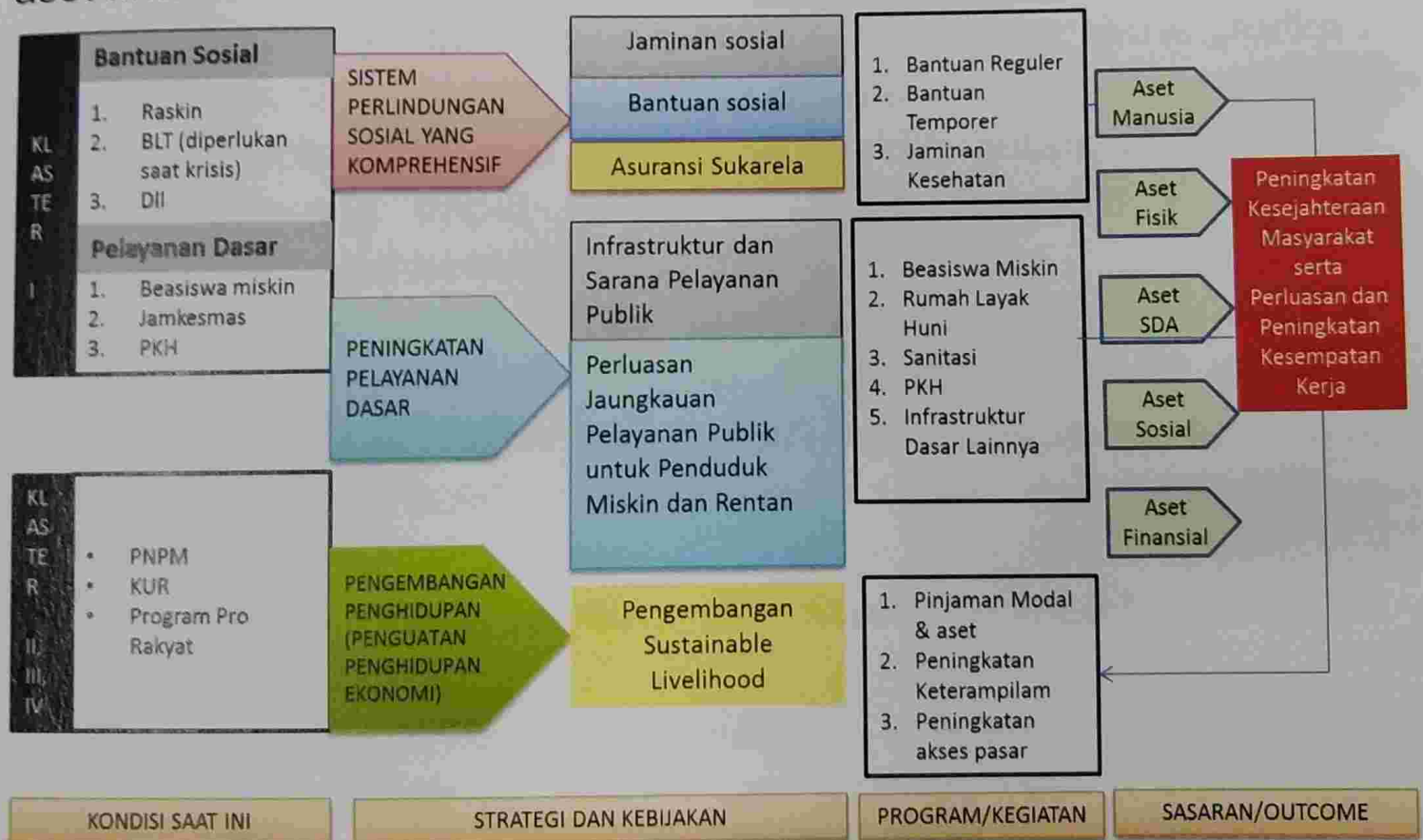
Data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sejak 2012 sudah dibawah 9%, sedangkan untuk wilayah perdesaan masih diatas 10% (Gambar 2). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat perkotaan dan perdesaan, yang dapat menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomis.



Gambar 2. Penurunan angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan di Indonesia, Maret 2012- September 2018

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan 2015-2019 meliputi: (i) Meningkatkan perluasan perlindungan sosial; (ii) Meningkatkan ketersediaan dan cakupan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, listrik); dan (iii) Mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan pengembangan penghidupan berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin.

Mengacu pada RPJMN, pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui pemberian jaminan sosial, bantuan sosial serta bantuan lainnya, peningkatan pelayanan dasar (sarana pelayanan publik) dan peningkatan kapabilitas masyarakat miskin dalam kehidupan ekonomi. Masyarakat harus mampu menguasai lima aset yang diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan serta perluasan dan kesempatan kerja yaitu (i) aset manusia, (ii) aset fisik, (iii) aset sumber daya alam (SDA), (iv) aset sosial, dan (v) aset finansial.



Gambar 3. Transformasi: Perlindungan Sosial, Pelayanan Dasar dan Penghidupan Berkelanjutan

PROGRAM DAN KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA)

Landasan pokok yang digunakan pemerintah (cq. Kementerian Pertanian) dalam program BEKERJA ini adalah Kebijakan makro, yang dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana disebutkan bahwa target pengentasan kemiskinan secara nasional pada tahun 2019 diharapkan dapat dibawah 8%. Realita di lapang menunjukkan bahwa angka kemiskinan untuk wilayah perdesaan masih cukup tinggi, yaitu sekitar 13,20%, dimana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian, sehingga program BEKERJA berbasis pada kegiatan pertanian sangat tepat untuk dilaksanakan.

Program BEKERJA sebagai implementasi RPJMN masuk dalam agenda prioritas nomor 5 NAWACITA, yaitu Meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia; dan Strategi nomor 3 yaitu Pengembangan peri kehidupan berkelanjutan. Pendekatan operasional yang dapat dilakukan dalam Program BEKERJA untuk pengentasan kemiskinan ini meliputi:

- (i) Pengadaan, akses dan pemanfaatan aset Penghidupan [aset sumberdaya manusia, sumberdaya sosial budaya, sumberdaya alam (lahan dan agroekosistem, tanaman, ternak dan ikan), sumberdaya finansial, dan sumberdaya fisik (infrastruktur)];
- (ii) Integrasi makro, mikro (kawasan), komunitas, Rumah Tangga; dan
- (iii) Graduasi menuju perikehidupan sejahtera berkelanjutan melalui pendampingan (coaching), tabungan, transfer aset, pelatihan ketrampilan dan bantuan konsumsi/pendapatan. Pengadaan, akses, dan pemanfaatan asset penghidupan (sumber daya manusia, sosial budaya, alam, finansial dan fisik/infrastruktur).

Target wilayah kegiatan Program BEKERJA untuk TA 2018 meliputi 10 provinsi dan 22 kabupaten dengan kapasitas program berupa bantuan ternak (50 ekor ayam/itik atau 2 ekor kambing/domba), tanaman hortikultura (sayuran atau buahan) dan tanaman tahunan, dengan sasaran 200.000 Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTM-P), dengan dana sebesar Rp. 901,5 milyar (Tabel 1).

Tabel 1. Target Lokasi Program BEKERJA TA 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Total RTM Kab	Total RTM Kab. Pertanian	%	Kecamatan/ Cluster	Desa	RTM Target	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(6)	(7)	(8)	(8)/(5)
1	JABAR	INDRAMAYU	237,401	66,934	28%	4	42	12,494	19%
		CIREBON	249,801	41,094	16%	4	45	5,851	14%
		TASIKMALAYA	211,806	74,327	35%	4	36	8,953	12%
		GARUT	315,408	85,582	27%	4	56	12,378	14%
2	JATENG	BANYUMAS	221,451	53,459	24%	4	52	9,366	18%
		PURBALINGGA	117,650	36,625	31%	4	63	9,622	26%
		BREBES	263,979	102,874	39%	4	75	29,927	29%
3	JATIM	BONDOWOSO	152,348	91,947	60%	3	25	12,915	14%
		JEMBER	295,291	140,544	48%	3	30	21,941	16%
		LUMAJANG	132,696	63,510	48%	3	36	14,029	22%
4	SULSEL	BONE	80,155	46,874	58%	4	47	9,000	19%
		TANA TORAJA	24,257	19,491	80%	3	45	5,507	28%
		TORAJA UTARA	23,665	16,194	68%	3	19	2,022	12%
5	SUMUT	LANGKAT	96,936	31,689	33%	2	22	3,595	11%
6	SUMSEL	OKI	72,324	47,451	66%	2	30	5,932	13%
7	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	132,138	58,749	44%	2	43	9,866	17%
8	BANTEN	PANDEGLANG	113,342	57,403	51%	3	36	3,162	6%
9	KALSEL	HSU	26,000	9,315	36%	2	54	1,693	18%
10	NTB	LOMBOK TENGAH	163,326	66,482	41%	2	20	13,173	20%
TOTAL			2,929,974	1,110,544		60	776	191,426	

Dengan adanya program bantuan ini diharapkan terjadi pemutusan perangkap lingkaran kemiskinan pada rumah tangga pertanian (Gambar 4).



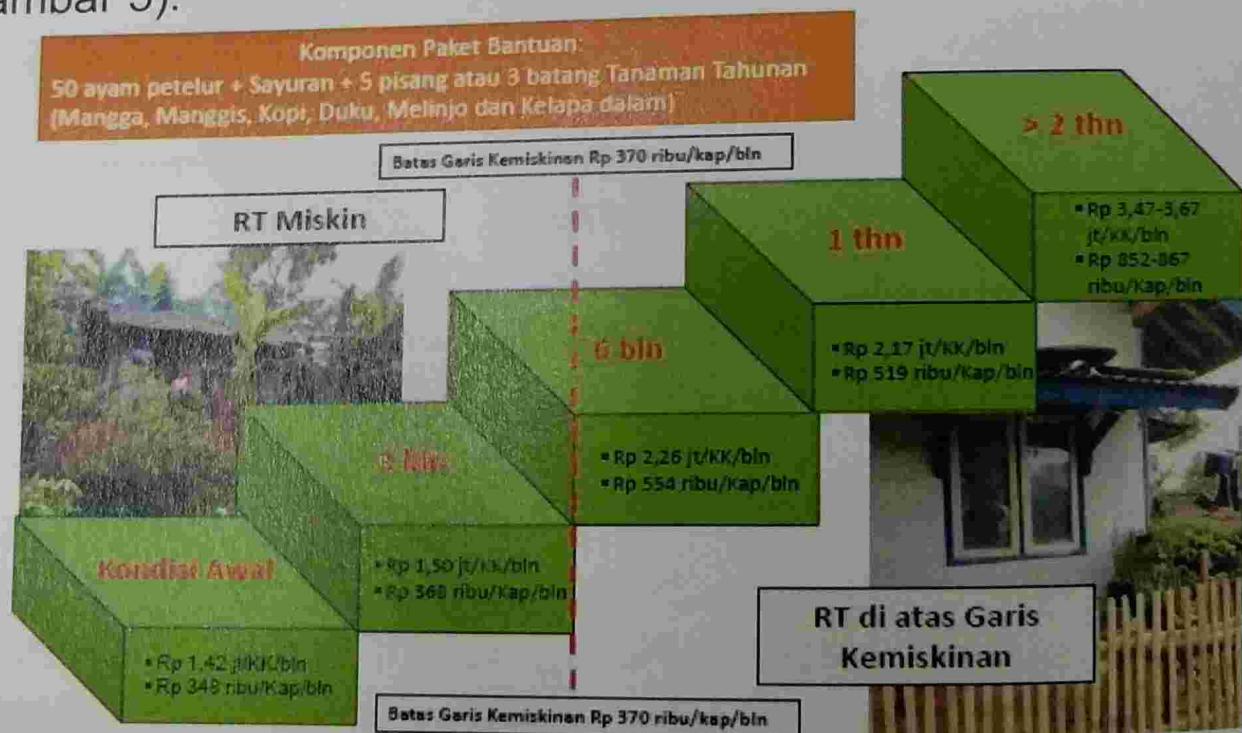
Gambar 4. Program BEKERJA TA 2018 dalam upaya memutus rantai kemiskinan di perdesaan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan BEKERJA di lapang, telah dibentuk payung hukum melalui Permentan No. 27/2018 tentang Perubahan atas Permentan No. 20/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian TA. 2018 dan Kepmentan No. 442/2018 tentang Perubahan atas Kepmentan No. 316/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian. Tim Pelaksana Program BEKERJA ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) Kementerian Pertanian yang terdiri

atas Pengarah, Pelaksana dan Evaluasi. Refokusing anggaran untuk Program Bekerja Lingkup Kementan serta Penyusunan Juknis BEKERJA (verifikasi CPCL dan pelaksanaan kegiatan oleh PJ Provinsi) di masing – masing Eselon 1. Pada masing-masing lokasi provinsi telah dibentuk penanggung jawab supervisi.

Kegiatan BEKERJA harus dilaksanakan secara holistik mulai dari penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, pemantauan dan pembinaan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mampu membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Sektor pertanian seyogyanya menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

Diharapkan adanya Program BEKERJA bagi RTM-P, akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita petani dalam jangka waktu dua tahun, sehingga akan didapat total pendapatan sebesar Rp 11,08 Triliun serta tambahan manfaat sebesar Rp 4,26 Triliun (Gambar 5).



Gambar 5. Proyeksi pendapatan RTM dengan bantuan utama Program BEKERJA TA 2018 berupa 50 ekor ayam/itik.

Implementasi program BEKERJA menggunakan tiga pola berbasis KRPL yang merupakan program DKP yang kemudian diintegrasikan dengan ayam dan tanaman tahunan; (i) KRPL berbasis inovasi (Balitbangtan), (ii) KRPL berbasis penguatan kelompok melalui pemberdayaan masyarakat (BPPSDMP) dan (iii) KRPL berbasis agribisnis peternakan (Ditjen PKH).

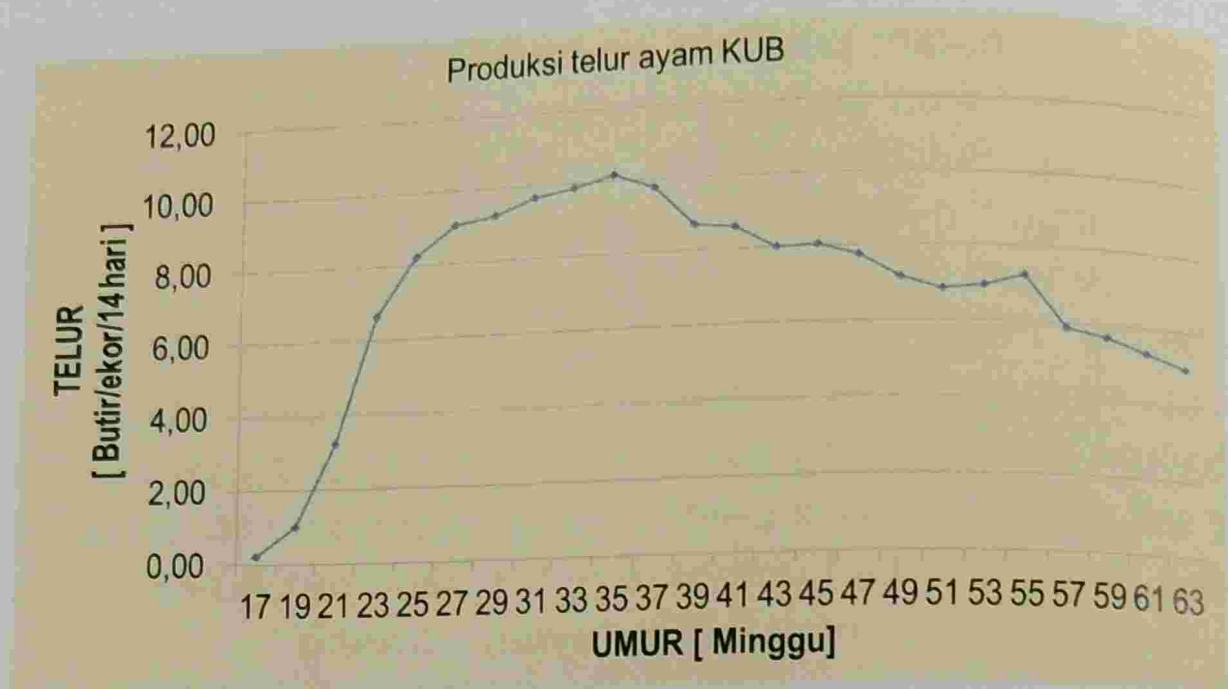
KETERSEDIAAN UNGGAS LOKAL NASIONAL Mendukung PROGRAM BEKERJA DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

Program BEKERJA melalui pemberian bantuan ternak berupa unggas lokal ini dapat menjadi pemicu untuk lebih mengangkat unggas lokal dalam program pemerintah setelah beberapa tahun ke belakang fokus pemerintah lebih ditekankan pada komoditas sapi potong. Selama periode 8 (delapan) tahun terakhir, *trend* perkembangan ayam lokal cukup bagus ditinjau dari aspek hulu sampai dengan hilir. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Puslitbang Peternakan berupa inovasi ayam KUB dan ayam Sentul yang sangat positif untuk diproduksi dalam upaya perbaikan mutu genetik ayam lokal Indonesia. Ayam KUB dikenal baik sebagai ayam tipe petelur yang diprogramkan sebagai ayam petelur nasional. Di Lombok ayam KUB umur 40-45 hari sangat populer digunakan untuk kuliner ayam taliwang.

Kriteria umum ayam/itik yang didistribusikan adalah ayam/itik lokal dan/atau persilangan yang dihasilkan oleh UPT/UPTD/*farm/breeding farm*/kelompok peternak binaan dinas dan harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Kabupaten. Kriteria jenis kelamin untuk DOC adalah *unsexling*, sementara untuk DOD proporsi betina 90% dan jantan 10%. Untuk ayam/itik umur 1-2 bulan persyaratan diatas masih ditambah dengan harus sudah divaksin ND dan AI dibuktikan dengan surat pernyataan dari pembibit.

Ayam KUB mempunyai karakteristik produksi telur mulai umur 17 minggu hingga 63 minggu dan mencapai puncaknya pada umur 35 minggu (menghasilkan 10 butir per 14 hari) dan mengalami penurunan setelahnya. Peternak mulai dapat memperoleh keuntungan saat ayam berumur 23 minggu, dimana setelah umur 37 minggu akan kembali turun. Karena bantuan pakan hanya diberikan hingga lama pemeliharaan 24 minggu,

maka peternak harus menjual telur untuk membeli pakan (23-57 minggu) dan setelah 57 minggu (akhir produksi telur) perlu diupayakan adanya *replacement* ayam agar program dapat berkesinambungan (Gambar 6).



Gambar 6. Grafik produksi telur ayam KUB

Penyediaan ayam untuk *replacement* diharapkan dapat diperoleh dari penetasan telur yang telah dihasilkan oleh RTM dimana kegiatan ini dapat dikoordinir oleh BUMDes. Bantuan ayam yang diberikan berupa ayam *unsexed* (50% jantan 50% betina), sehingga pada sebagian ayam jantan yang telah berumur 10 atau 19 minggu dapat dijual sebagai ayam pedaging, sementara ayam betina dapat terus dipelihara sebagai indukan untuk petelur. Sebagian kecil ayam jantan dapat tetap dipelihara sebagai pejantan.

Pembibitan ayam lokal skala besar mulai berkembang di Bogor pada tahun 2013-2014, dengan produksi ayam KUB dan Sentul sebanyak 90 ribu – 120 ribu ekor. PT. AKI sebagai pemegang lisensi pembibitan ayam KUB dan Sentul yang

pertama, telah mampu memproduksi 60.000 ekor DOC/bulan, yang kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan pembibitan yang relatif besar, termasuk PT. Sumber Unggas Indonesia dan PT. Putra Perkasa Genetika.

Selain pembibitan ayam lokal yang berlisensi tersebut, berkembang pula pembibitan ayam lokal di masyarakat yang menghasilkan ayam Super dan Joper (persilangan antara ayam lokal dengan ras). Usaha ini tidak terkontrol dengan baik, sehingga dapat mengancam sumberdaya genetik ayam lokal di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang intensif dari pemerintah, sehingga aktivitas ini dapat berkembang secara terkendali tidak sampai merusak sumberdaya ayam lokal yang ada.

Untuk tahun 2018, dua perusahaan pembibitan anggota HIMPULI akan mensuplai sekitar 5 – 5,5 juta ekor bibit ayam dari total target sebesar 10 juta ekor (sebesar 55%). Hal ini disebabkan adanya keterbatasan jumlah *Parent Stock* yang dimiliki, kandang, dan juga mesin penetas. Disisi lain, dalam pengadaan bibit ayam umur 1-2 bulan terkendala oleh ketersediaan kandang pembesaran dan *brooder*, disamping biaya pakan yang harus dikeluarkan oleh produsen yang cukup besar. Kekurangan penyediaan bibit ayam/itik dari perusahaan pembibitan akan dilengkapi oleh ayam bibit hasil unit pembibitan Strata 1 yang ada di UPT Litbangtan.

Pengadaan DOC ayam dapat dilakukan relatif lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan ayam bibit umur 1-2 bulan. Namun mortalitas DOC di lapang cukup tinggi bahkan diperkirakan dapat mencapai hingga 90%, sehingga perlu perhatian khusus untuk menanggulangi hal ini. Penyebab utamanya adalah karena petani miskin mempunyai keterbatasan fasilitas yang dimiliki untuk merawat DOC (kandang, pemanas, listrik, kualifikasi kelompok tani). Penyediaan bibit ayam umur 1-2 bulan dapat menekan kegagalan menjadi hanya sekitar 15%,

tetapi terkendala dalam penyediaannya dalam hal tidak tersedianya kandang pembesaran dan harga ayam yang fluktuatif.

Persoalan yang dihadapi oleh pembibit berlisensi adalah masalah harga bibit ayam berlisensi yang dipatok sama dengan harga bibit ayam lokal biasa. Diharapkan harga bibit ayam ini dapat diatur secara adil, dimana harga ayam dari pembibit yang berlisensi tidak dapat disamakan (harusnya lebih tinggi) dengan harga ayam lokal biasa. Hal ini dikarenakan pembibit berlisensi harus membayar biaya pembelian lisensi dan PNBP.

Kegiatan pendampingan terhadap kegiatan BEKERJA perlu dilaksanakan, agar program berjalan sesuai dengan rencana dan target output yang ditetapkan. Pengawalan dan pendampingan diperlukan mulai dari penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, pemantauan dan pembinaan bagi RTM penerima.

Pendampingan dan pengawalan Program BEKERJA dilakukan melalui kegiatan diseminasi IPTEK peternakan termasuk didalamnya pendampingan survei lokasi dan operasional Program BEKERJA. Pembinaan kelembagaan peternakan unggas lokal dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (petani penerima/RTM) menjadi keniscayaan agar usaha yang dijalankan tersebut dapat terus berkelanjutan dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi petani miskin.

Dalam Program BEKERJA, petani akan didampingi dengan introduksi inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian mendukung peningkatan produksi unggas lokal. Inovasi teknologi yang akan didesiminasikan adalah teknologi yang dihasilkan lembaga litbang (lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga lainnya) sesuai dengan kebutuhan. Alih teknologi dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada RTM penerima unggas lokal beserta prasarana dan sarana pendukungnya. Jika ditemukan permasalahan, akan dilakukan modifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. RTM contoh yang menerapkan

inovasi IPTEK dapat bertindak sebagai Laboratorium Lapang
unggas lokal untuk dapat dikembangkan ke petani di desa lainnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDUKUNG PROGRAM BEKERJA BERBASIS PERTANIAN GUNA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI DESA

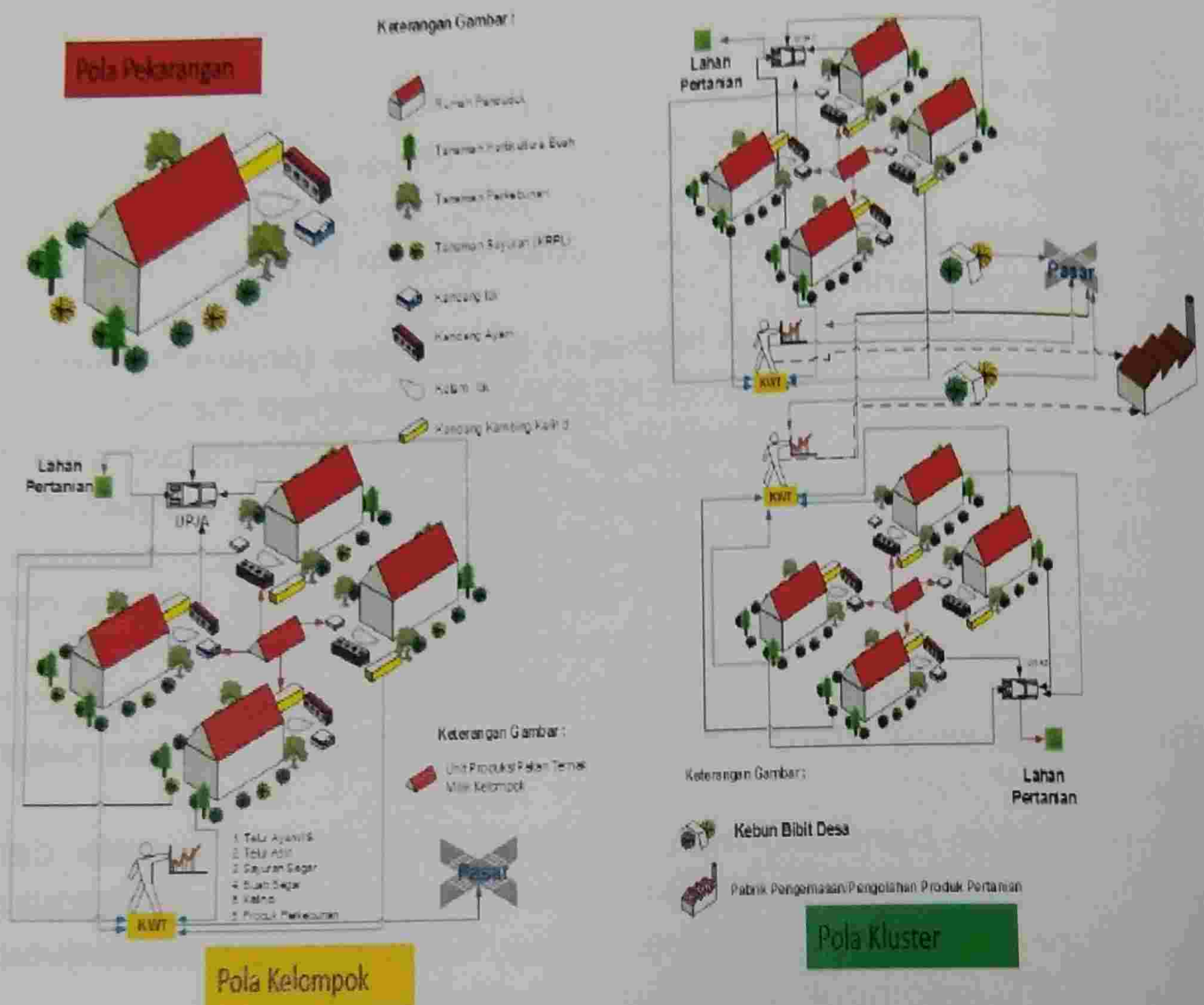
Perencanaan Program BEKERJA sangat baik dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang masih terjadi selama ini, utamanya di wilayah perdesaan. Secara konsep hal ini diperlukan kehati-hatian dimana harus disusun rancang bangun yang jelas, disamping *roadmap* yang jelas dari awal tahun pelaksanaan 2018 hingga akhir 2024 dimana RTM-P diharapkan sudah dapat mandiri.

Guna memutus rantai lingkaran kemiskinan (*chains of vicious circle of poverty*), program BEKERJA harus mampu memutus dua titik sentral yang menyebabkan rendahnya kapabilitas rumah tangga petani melalui peningkatan SDM (ketahanan pangan dan gizi), serta peningkatan ekonomi sehingga mampu melakukan akumulasi aset. Fokus dapat dilakukan pada skala pekarangan rumah tangga, pola kelompok atau klasterisasi (Gambar 7).

Ada 4 (empat) aspek yang menjadi simpul kritis pada Program BEKERJA yang harus mendapatkan perhatian. Hal tersebut meliputi:

- (i) **Paket bantuan**, meliputi kesesuaian dengan kondisi dan aspirasi petani, kecukupan skala usaha dan peningkatan pendapatan, kecukupan untuk basis usaha berkelanjutan (RT, kelompok, komunitas, kawasan);
- (ii) **Penyampaian bantuan**, meliputi: pengadaan, logistik, kesesuaian jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat, konkurensi antar UK dan dengan RTPM);
- (iii) **Penggunaan** meliputi: kesesuaian peruntukan, kesesuaian teknis, pemeliharaan; dan
- (iv) **Pemanfaatan hasil**, meliputi: tabungan dan investasi, perluasan usaha, peremajaan.

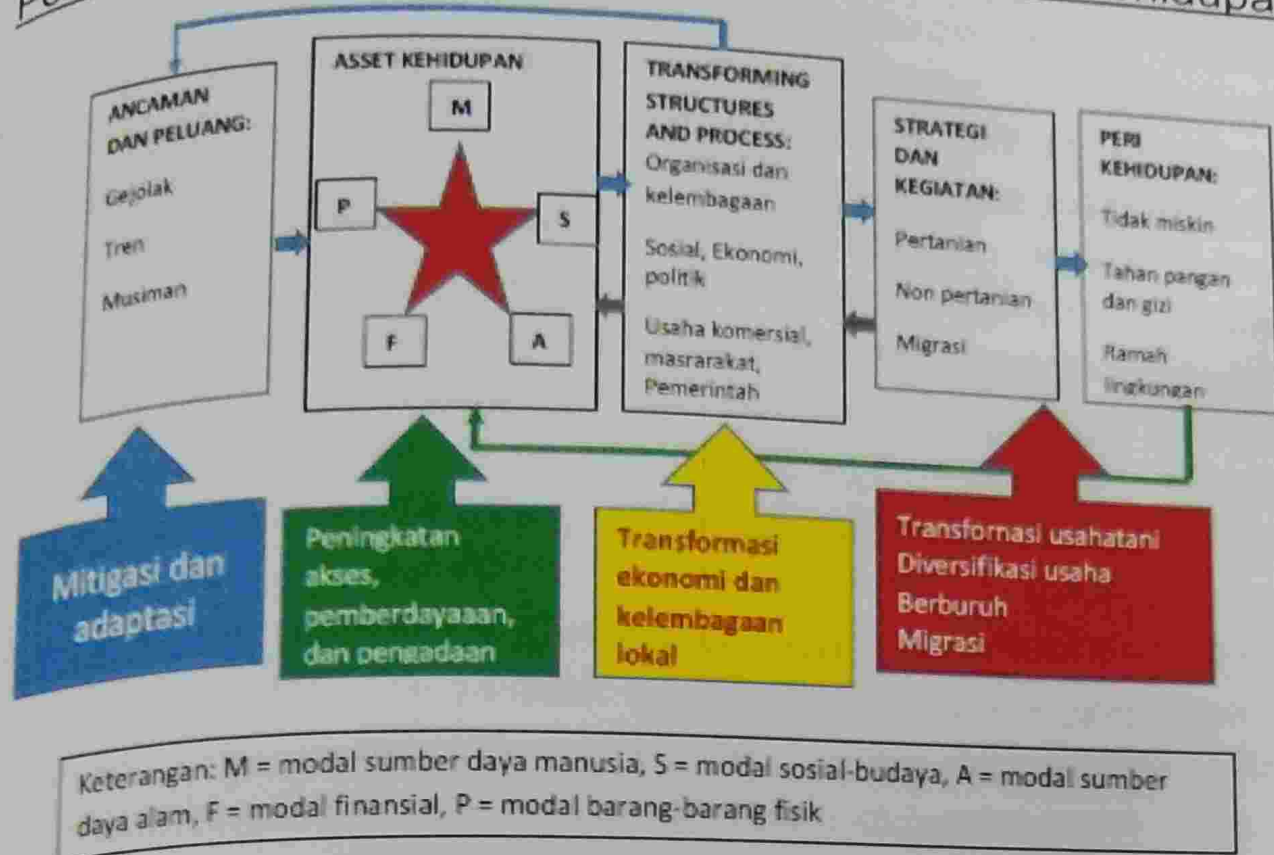
Perlu pengkajian simpul-simpul kritis berkaitan dengan aset, pendistribusian, dan kemungkinan adanya bantuan selanjutnya jika program ini selesai (*replacement stock*, dll).



Gambar 7. Ilustrasi pola pekarangan, pola kelompok dan pola kluster Program BEKERJA TA 2018.

Hal penting yang harus diperhatikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan Program BEKERJA ini antara lain: (i) Penerapan hendaknya Konsisten Pendekatan Peri Kehidupan, (ii) Pelaksanaan 2018, dan (iii) Implementasi 2019 dan seterusnya.

1) Penerapan: Konsisten dengan Pendekatan Peri Kehidupan



Konsisten dengan pendekatan peri kehidupan pada kegiatan BEKERJA dimana kegiatan tahun 2018 fokus pada intervensi usaha budidaya pertanian. Tambahan intervensi pendukung yang dapat dilakukan berupa:

- 1) Transformasi peri kehidupan RTPM:
 - Berburuh
 - Usaha non budidaya pertanian
- 2) Transformasi ekonomi dan kelembagaan lokal:
 - Rantai nilai agribisnis berbasis korporasi petani
 - Sistem Inovasi: Berintikan pembibitan dan penyuluhan
 - Lembaga pendukung: Finansial, pasar, dsb
- 3) Pengembangan aset peri kehidupan secara lengkap: Sumber daya manusia, Sosial budaya, Finansial, Infrastruktur
- 4) Mitigasi dan adaptasi resiko (Makro)

2. Pelaksanaan 2018
Arah pelaksanaan Program BEKERJA berupa inisiasi pelaksanaan pendekatan peri kehidupan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan rancang bangun dan peta jalan pelaksanaan program untuk setiap desa dan kabupaten serta adanya konvergensi pola di setiap lokus. Sasaran akhir yang hendak dicapai adalah: Kawasan pertanian *pro-poor* berbasis inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan rantai nilai korporasi petani. Tiga pola yang diterapkan pada 2018 hanya inisiasi karena ketentuan anggaran berjalan.

Stop gap operasional yang ada pada simpul-simpul kritis, yang meliputi:

- 1) Paket bantuan: *gap* operasional dapat dikurangi dengan memasukkan elemen:
 - Pembibitan: Bakalan inti system inovasi
 - Kelembagaan (ekonomi) petani: bakalan inti rantai nilai korporasi petani
- 2) Pengadaan dan penyaluran bibit: *gap* operasional dapat dikurangi dengan
 - Inovatif (Balitbangtan): Memungsikan BPTP sebagai BBI
 - Komersial: Kerjasama swasta
 - Adaptif: Sumber lokal
- 3) Pemanfaatan dan keberlanjutan: *gap* operasional dapat dikurangi dengan melakukan:
 - Pendampingan petani, dan
 - Sistem money ketat

3. Implementasi 2019 dan seterusnya

- 1) Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani *imperative* dalam pembangunan pertanian
- 2) Bekerja meletakkan fondasi program penanggulangan kemiskinan masa depan:

- Perubahan arah kebijakan
 - Inisiasi rancang bangun dan pelaksanaan
- 3) Perlu disusun rancang bangun dan peta jalan 2018-2024
 - 4) Program terpadu kegiatan 2019 sudah semestinya siap rancang pada 2018 => Simpul-simpul kritis tersebut sebelumnya perlu diperhatikan

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam program BEKERJA adalah sistem logistik atau pendistribusian pakan bagi peternak yang tergabung dalam kelompok, dalam kondisi jumlah besar dengan lokasi yang jauh, serta penggunaan jangka panjang. Pendistribusian pakan tidak dapat dilakukan sekaligus karena peternak tidak mempunyai tempat penyimpanan pakan yang baik, sehingga dikhawatirkan pakan akan berjamur dan mempengaruhi produktivitas ayam. Pendistribusian pakan sebaiknya dilakukan setiap 3 – 4 minggu, sehingga diperlukan sarana pendistribusian pakan yang memadai. Sistem distribusi logistik menjadi hal penting yang harus diperhatikan sehingga masalah ini dapat teratasi.

Lesson learned dari berbagai hasil kajian terkait dengan pengentasan kemiskinan dapat dilihat dan dipelajari sehingga akan dapat memberikan keberhasilan yang lebih besar untuk program BEKERJA ini. Persoalan yang paling krusial dalam program pengentasan kemiskinan adalah pada kelembagaannya yang meliputi persoalan koordinasi, dan kompetensi SDM pelaksana. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, pertanian merupakan salah satu determinan yang kuat dalam program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, jika hanya didasarkan pada outcome saja tidak akan efektif, sehingga sebaiknya dapat lebih fokus pada agroindustri/hilirisasi (pengembangan *value chain*). Persoalan lain yang banyak terjadi dalam program pengentasan kemiskinan adalah adanya kesalahan target, misal target hanya boleh maksimal 5%. Untuk mengatasi hal ini antara lain dapat

dilakukan berbasis keluarga (pemberdayaan perempuan, *finance* melalui program modal mikro dengan sasaran ibu-ibu dalam kelompok 15-20 orang sehingga menjadi lebih efektif) dan komunitas.

Untuk kawasan perdesaan dalam pengentasan kemiskinan harus mempertimbangan agroekosistemnya karena akan menentukan keberhasilannya. Pada lahan campuran, ternak merupakan salah satu poin keberhasilan. Lokasi dipilih sebaiknya yang sudah agak berkembang. Selain itu faktor transportasi darat juga menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan dalam suatu program pengentasan kemiskinan.

LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil pemaparan narasumber dan diskusi memberikan beberapa alternatif/opsi rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi langkah tindak lanjut. Hal ini diantaranya adalah:

1. Dalam pelaksanaan program BEKERJA sudah ditentukan target lokasi, distribusi dan strategi pelaksanaan, sehingga realisasi kegiatan tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Target tersebut termasuk peningkatan produksi pertanian, salah satunya melalui usaha pengembangan ayam lokal unggul sehingga terwujud peningkatan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Dalam realisasi pengadaan sarana bibit oleh Himpuli, dirasakan masih banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga target sesuai permintaan (pesanan bibit), belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk itu perlu dibuat tahapan pencapaian target sesuai dengan kapasitas optimum dari pembibit. Kualifikasi bibit oleh penyuplai juga menjadikan perhatian karena dilihat dari kualitas genetik oleh Himpuli adalah kualitas bagus, dan perlu dipertimbangkan dalam hal harga pembeliannya. Disarankan pendistribusian bibit ayam sebaiknya umur 1-2 bulan dalam upaya menghindari kematian di lapangan, karena sasaran RTM sebagai penerima manfaat dalam budidaya unggas masih rendah.
3. Perlu dilakukan optimalisasi pada semua unit perbibitan yang telah dibangun di UPT lingkup Balitbangtan, di 7 BPTP dan embrio model perbibitan di 17 provinsi untuk mengurangi *gap* operasional dalam program BEKERJA.
4. Konsep dasar perencanaan perlu dirancang meliputi rancang bangun kegiatan lengkap dengan *Roadmap* dan target tahunan jangka panjang (hingga tahun 2024). Pembelajaran

- tentang simpul kritis kegiatan program adalah merupakan hal penting untuk diantisipasi dalam menghindari kegagalan program yang dirancang.
5. Perlu dibuat sistem pemantauan yang sangat ketat untuk evaluasi yang dapat dilakukan secara mingguan atau harian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui progress kegiatan seperti jumlah kematian, perkembangan populasi, dlsb yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program ke depan.
 6. Perlu kelembagaan yang mampu memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pengawalan secara serius. Pendampingan dan pengawalan harus dan wajib dilakukan dimana akan dilakukan bimtek paling lambat H-1 sebelum penyaluran. Satu satker akan bertanggung jawabi 5 lokasi pendampingan atau pengawalan. Dalam pelaksanaan program BEKERJA harus bersinergi dengan pelaksana di lapangan dan BPTP.
 7. Beberapa rekomendasi yang diusulkan bagi pelaksanaan program BEKERJA antara lain (i) Penerapan: konsisten dengan pendekatan penghidupan dimana kegiatan tahun 2018 fokus pasa intervensi usaha budidaya pertanian, (ii) Pelaksanaan 2018: Perlu rancang bangun dan peta jalan pelaksanaan program untuk setiap desa dan kabupaten; dan (iii) Pelaksanaan 2019 dan seterusnya: Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani *imperative* dalam pembangunnn pertanian, Program BEKERJA meletakkan fondasi program penanggulangan kemiskinan masa depan (Perubahan arah kebijakan dan Inisiasi rancang bangun dan pelaksanaan), perlu disusun rancang bangun dan peta jalan 2018-2024, serta Program terpadu kegiatan 2019 sudah semestinya siap rancang pada 2018 dimana simpul-simpul kritis tersebut sebelumnya perlu diperhatikan.

**MATRIKS RENCANA TINDAK STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT
SEJAHTERA (BEKERJA)**

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. PENERAPAN PROGRAM BEKERJA			
Penerapan program BEKERJA yang konsisten dengan pendekatan penghidupan dimana kegiatan tahun 2018 fokus pasa intervensi usaha budidaya pertanian	pendekatan penghidupan dimana kegiatan tahun 2018 fokus pasa intervensi usaha budidaya pertanian	2018	Ditjen PKH, HIMPULI; Balitbangtan; Eselon I Lingkup Kementan
II. PELAKSANAAN PROGRAM BEKERJA 2018			
Perlunya Rancang bangun dan peta jalan pelaksanaan program untuk setiap desa dan kabupaten	Rancang bangun dan peta jalan	2018	Ditjen PKH, HIMPULI; Balitbangtan; Eselon I Lingkup Kementan
III. PELAKSANAAN PROGRAM BEKERJA 2019-2024			
Perlunya rancang bangun dan peta jalan 2019-2024	Rancang Bagun 2019-2024	2019	Ditjen PKH, HIMPULI; BALITBANG TAN ESELON I Lingkup Kementan

DAFTAR BACAAN

Arifin, B. 2001. Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah struktur, kasus dan alternatif strategi. Erlangga, Jakarta.

Ditjenak. 2009. Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.

Hayanti Sari Yanti. 2014. Petunjuk Teknis Budidaya Ayam Kampung Unggul (KUB) Badan Litbang Pertanian Di Provinsi Jambi. Jambi (Id): BPTP Jambi.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 442/Kpts/OT.050/6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) Kementerian Pertanian.

Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 146.1/Kpts/KP.310/H/05/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 55.4/Kpts/OT.050/H.5/07/2018 tentang Pembentukan Tim Pendamping Teknis dan Administrasi Program #Bekerja Kabupaten Indramayu Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program
Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian
Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
27/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program
Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian
Tahun Anggaran 2018.
- Saragih, B. 2010. Agribisnis: Paradigma baru pembangunan
ekonomi berbasis pertanian. IPB Press, Bogor.
- Simatupang, P. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan
Prosedur Pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian 1 (1):
14 - 35.
- Simatupang, P, et al. 2013. Strategi Induk Pembangunan
Pertanian 2045. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Suradisastra, K., P. Simatupang dan B. Hutabarat. 2010.
Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya saing
Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani. Pusat Analisis
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Suryana, Yasin, M. 2014. Peningkatan kapasitas kebun
percobaan mendukung pengembangan perbibitan ayam
Kampung Unggul Badan Litbang (KUB) di Kalimantan
Selatan. Laporan akhir kegiatan. Banjarbaru (Id): BPTP
Kalimantan Selatan.
- Weimer, D. L. and A. R. Vining. 1989. Policy Analysis: Concept
and Practice. Prentice Hall Inc. Englewoods, N. J., USA.

Williams, W. 1971. Social Policy Research and Analysis.
American Elsevier Publishing Company, New York, USA.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.
TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN
RESPONSIF KEBIJAKAN STRATEGIS
PETERNAKAN DAN VETERINER

Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Pternakan dan Veteriner

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pternakan Nomor: 38.6/Kpts//OT.050/H.5/01/2018 Tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Pternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Pternakan, maka Tim dimaksud adalah:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ismeth Inounu, MS

Sekretaris : Priyono, S.Pt, M.Si

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. Arnold P. Sinurat, M.Sc
2. Dr. Ir. Atien Priyanti SP, M.Sc
3. Dr. Ir. Bess Tiesnamurti, M.Sc
4. Dr. Ir. Endang Romjali, M.Sc
5. Dr. Ir. Eko Handiwirawan, M.Si
6. Dr. Wisri Puastuti, S.Pt, M.Si
7. Ir. Dwi Priyanto, MS
8. Dr. Drh. R.M. Abdul Adjid
9. Ratna Ayu Saptati, S.Pt, M.Si, Ph.D
10. Drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si

Tim Perumus

1. Prof (R). Dr. Ir. Ismeth Inounu, MS (Ketua)
2. Ir. Dwi Priyanto M.Si.
3. Ratna Ayu Saptati, S.Pt, M.Si, Ph.D

LAMPIRAN 2. RINGKASAN PAPARAN NARASUMBER

KETERSEDIAAN UNGGAS LOKAL NASIONAL Mendukung PROGRAM BEKERJA DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

Ade Zulkarnaen

Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia
(HIMPULI)

RINGKASAN

Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI) sangat mendukung program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Program ini dapat menjadi pemicu untuk lebih mengangkat unggas lokal dalam program pemerintah setelah beberapa tahun kebelakang fokus pemerintah lebih ditekankan pada komoditas sapi potong.

Selama periode 8 tahun terakhir, trend perkembangan ayam lokal cukup bagus ditinjau dari aspek hulu sampai dengan hilir. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Puslitbang Peternakan berupa inovasi ayam KUB dan ayam Sentul yang sangat positif untuk diproduksi dalam upaya perbaikan mutu genetik ayam lokal Indonesia. Ayam KUB dikenal baik sebagai ayam tipe petelur yang diprogramkan sebagai ayam petelur nasional. Di Lombok ayam KUB umur 40-45 hari sangat populer digunakan untuk kuliner ayam taliwang.

Pembibitan ayam lokal skala besar mulai berkembang di Bogor pada tahun 2013-2014, dengan produksi ayam KUB dan Sentul sebanyak 90 ribu – 120 ribu ekor. PT. AKI sebagai pemegang lisensi pembibitan ayam KUB dan Sentul yang pertama, telah mampu memproduksi 60.000 DOC/bulan, yang kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan pembibitan yang relatif besar, termasuk PT. Sumber Unggas dan PT. Putra Perkasa Genetika.

Selain pembibitan ayam lokal yang berlisensi tersebut, berkembang pula pembibitan ayam lokal di masyarakat yang menghasilkan ayam Super dan Joper (persilangan antara ayam lokal dengan ras). Usaha ini tidak terkontrol dengan ayam lokal yang baik, sehingga dapat mengancam sumberdaya genetik ayam lokal di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang intensif dari pemerintah, sehingga aktivitas ini dapat berkembang secara terkendali tidak sampai merusak sumberdaya ayam lokal yang ada.

Guna mendukung program #BEKERJA dua perusahaan pembibitan anggota HIMPULI hanya mampu mensuplai sekitar 5 – 5,5 juta ekor bibit ayam dari total target sebesar 10 juta ekor (sebesar 55%). Hal ini disebabkan adanya keterbatasan jumlah Parent Stock yang dimiliki, kandang, dan juga mesin penetas. Disisi lain, dalam pengadaan bibit ayam umur 1-2 bulan terkendala oleh ketersediaan kandang pembesaran dan brooder, disamping biaya pakan yang harus dikeluarkan oleh produsen yang cukup besar.

HIMPULI berharap bahwa harga bibit ayam agar dapat diatur secara adil, dimana ayam dari pembibit yang berlisensi tidak dapat disamakan dengan harga ayam lokal biasa. Hal ini dikarenakan pembibit berlisensi harus membayar biaya pembelian lisensi dan PNBP.

Pengadaan DOC ayam dapat dilakukan relatif lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan ayam bibit umur 1-2 bulan. Namun mortalitas DOC di lapang cukup tinggi bahkan dapat mencapai hingga 90%, sehingga perlu perhatian khusus untuk menanggulangi hal ini. Penyebab utamanya adalah karena petani miskin mempunyai keterbatasan fasilitas yang dimiliki untuk merawat DOC (kandang, pemanas, listrik, kualifikasi kelompok tani). Penyediaan bibit ayam umur 1-2 bulan dapat menekan kegagalan menjadi hanya sekitar 15%, tetapi terkendala dalam

penyediaannya dalam hal tidak tersedianya kandang pembesaran dan harga ayam yang fluktuatif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDUKUNG PROGRAM BEKERJA BERBASIS PERTANIAN GUNA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI DESA

Pantjar Simatupang

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

RINGKASAN

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) adalah sistem logistik atau pendistribusian pakan bagi peternak yang tergabung dalam kelompok, dalam kondisi jumlah besar dengan lokasi yang jauh, serta penggunaan jangka panjang. Pendistribusian pakan tidak dapat dilakukan sekaligus karena peternak tidak mempunyai tempat penyimpanan pakan yang baik, sehingga dikhawatirkan pakan akan berjamur dan mempengaruhi produktivitas ayam. Pendistribusian pakan sebaiknya dilakukan setiap 3 – 4 minggu, sehingga diperlukan sarana pendistribusian pakan yang memadai. Sistem distribusi logistik menjadi hal penting yang harus diperhatikan sehingga masalah ini dapat teratasi.

Dari aspek perencanaan program tersebut sangat baik dalam rangka pengentasan kemiskinan yang masih terjadi selama ini. Tetapi dari tatanan konsep diperlukan kehati-hatian dimana harus disusun rancang bangun yang jelas, disamping Roadmap yang jelas dari awal tahun pelaksanaan 2018 hingga akhir 2024 dimana petani diharapkan sudah dapat mandiri.

Pendekatan operasional yang dapat dilakukan dalam program #BEKERJA untuk pengentasan kemiskinan meliputi: (i) Pengadaan, akses dan pemanfaatan aset Penghidupan [aset sumberdaya manusia, sumberdaya sosial budaya, sumberdaya alam (lahan dan agroekosistem, tanaman, ternak dan ikan),

sumberdaya finansial, dan sumberdaya fisik (infrastruktur)]; (ii) Integrasi makro, mikro (kawasan), komunitas, Rumah Tangga; dan (iii) Graduasi menuju perikehidupan sejahtera berkelanjutan melalui pendampingan (coaching), tabungan, transfer aset, pelatihan ketrampilan dan bantuan konsumsi/pendapatan.

Guna memutus rantai lingkaran setan kemiskinan (chains of vicious circle of poverty), program #BEKERJA harus mampu memutus dua titik sentral yang menyebabkan rendahnya kapabilitas rumah tangga petani melalui peningkatan SDM (ketahanan pangan dan gizi) serta peningkatan ekonomi sehingga mampu melakukan akumulasi aset. Fokus dapat dilakukan pada skala pekarangan rumah tangga, pola kelompok atau klasterisasi.

Implementasi program #BEKERJA menggunakan tiga pola berbasis KRPL yang merupakan program DKP yang kemudian diintegrasikan dengan ayam dan tanaman tahunan; (i) KRPL berbasis inovasi (Balitbangtan), (ii) KRPL berbasis penguatan kelompok melalui pemberdayaan masyarakat (BPPSDMP) dan (iii) KRPL berbasis agribisnis peternakan (PKH).

Beberapa simpul kritis yang harus mendapatkan perhatian adalah (i) paket bantuan [meliputi kesesuaian dengan kondisi dan aspirasi petani, kecukupan skala usaha dan peningkatan pendapatan, kecukupan untuk basis usaha berkelanjutan (RT, kelompok, komunitas, kawasan)]; (ii) penyampaian bantuan (meliputi pengadaan, logistik, kesesuaian jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat, konkurensi antar UK dan dengan RTPM); (iii) penggunaan (kesesuaian peruntukan, kesesuaian teknis, pemeliharaan); (iv) pemanfaatan hasil (tabungan dan investasi, perluasan usaha, peremajaan). Perlu pengkajian simpul-simpul kritis berkaitan dengan aset, pendistribusian, dan kemungkinan adanya bantuan selanjutnya jika program ini selesai (replacement stock, dll).

Lesson learnt dari berbagai hasil kajian terkait dengan pengentasan kemiskinan dapat dilihat dan dipelajari sehingga

akan dapat memberikan keberhasilan yang lebih besar untuk program #BEKERJA ini. Persoalan yang paling krusial dalam program pengentasan kemiskinan adalah pada kelembagaannya yang meliputi persoalan koordinasi, dan kompetensi SDM pelaksana. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, pertanian merupakan salah satu determinan yang kuat dalam program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, jika hanya didasarkan pada outcome saja tidak akan efektif, sehingga sebaiknya dapat lebih fokus pada agroindustri/hilirisasi (pengembangan value chain). Persoalan lain yang banyak terjadi dalam program pengentasan kemiskinan adalah adanya kesalahan target, misal target hanya boleh maksimal 5%. Untuk mengatasi hal ini antara lain dapat dilakukan berbasis keluarga (pemberdayaan perempuan, finance melalui program modal mikro dengan sasaran ibu-ibu dalam kelompok 15-20 orang sehingga menjadi lebih efektif) dan komunitas.

Untuk kawasan perdesaan dalam pengentasan kemiskinan harus mempertimbangan agroekosistemnya karena akan menentukan keberhasilannya. Pada lahan campuran, ternak merupakan salah satu poin keberhasilan. Lokasi dipilih sebaiknya yang sudah agak berkembang, jangan yang miskin betul. Selain itu faktor transportasi darat juga menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan dalam suatu program pengentasan kemiskinan.



Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav E59 Bogor
Telp. (0251) 8322185, 8322138
Fax. (0251) 8328382, 8320558
Email: criansci@indo.net.id

ISBN 978-602-6473-12-7

